

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Edisi Khusus

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubau

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Post

Kamis
21 November 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Pasca Dilantik, Unsur Pimpinan DPRD Perkuat Kemitraan Dengan Pemkot Baubau



Ardin Jufri dilantik jadi Ketua DPRD Baubau definitif

Laporan: Ardi, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP-Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan Pemerintah Kota Baubau adalah mitra sejajar dengan fungsi yang berbeda dalam menjalankan otonomi daerah.

Menko Yusril: Nasib Mary Jane di Tangan Filipina Jika Telah Dipindah



Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Laporan: Andina L

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan Yusril

Ihza Mahendra menyebutkan nasib narapidana hukuman mati Mary Jane berada di tangan Pemerintah Filipina jika proses pemindahan narapidana

atau transfer of prisoner terhadapnya benar-benar terealisasi.

“Bahwa setelah kempa-

Lanjutan ke Hal: 7

Cadewas KPK Kritik Penyadapan Tanpa Izin hingga Minta Wajib LHKPN

JAKARTA- Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK memaparkan visi-misi dan pendapatnya dalam fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta,

Rabu (20/11).

Cadewas KPK Mirwazi mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kewenangan Dewas KPK dalam mengatur izin pe-

Lanjutan ke Hal: 7

Di KTT G20, Prabowo Beber Alasan RI Pindah Ibu Kota Negara



Presiden Prabowo Subianto di acara KTT G20 di Brazil.

Keduanya memiliki hubungan kerja dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan pada daerah,

Lanjutan ke Hal: 7

JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia terdampak langsung perubahan iklim, termasuk

Lanjutan ke Hal: 7

Prodi S2 Ilmu Perikanan dan Fakultas IKIP Unhas Makassar Praktek Lapang Terpadu di Kota Baubau



Pewarta: Lisna

BAUBAU, BP-Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Sulsel yang

terdiri dari program studi S2 Ilmu Perikanan dan Fakultas IKIP melakukan praktek lapang terpadu di Kota Baubau.

Praktek lapang terpadu Unhas ini diterima secara resmi Pj Wali Kota Baubau.

Lanjutan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Pasca Dilantik, Unsur Pimpinan DPRD Perkuat Kemitraan Dengan Pemkot Baubau

karenanya diharapkan unsur pimpinan dewan dapat mengantarkan DPRD Kota Baubau pada sinergi hubungan yang profesional, harmonis, seimbang dan memperkuat kemitraan dengan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan stakeholder lainnya serta tugas-tugas fungsi dan kewenangan masing-masing.

Demikian sambutan Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si pada rapat paripurna peresmian dan pengambilan sumpah ketua DPRD Kota Baubau Tahun 2024-2029 di Di Gedung DPRD Kota Baubau Selasa

(19/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, Dr H Muh Rasman Manafi juga menyampaikan terkait dokumen perencanaan Kota Baubau untuk 20 tahun ke depan telah ditetapkan dan saat ini akan didorong untuk menyelesaikan dokumen perencanaan yang 5 tahun, 1 tahun atau RKPD dan kemudian akan ditetapkan dalam bentuk perencanaan anggaran tahun 2025.

“Tentu ini akan menjadi kerja kolektif dan strategis, dan dalam waktu dekat tentu harapan kami kepada pimpinan DPRD, para anggota DPRD Kota Baubau dapat terus ber-

sama bergandengan tangan membangun negeri kita, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para pendahulu, para pemimpin kita dan para senior kita. Jika hendak terbang ke Baubau harus bersama lainnya, jika kita komitmen membangun Baubau bekerja bersama tagline nya,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini menutup sambutannya dengan sebuah ungkapan yang berbunyi “Hai anak negeri butuni, generasi pelanjut marwah negeri bangkitlah, bergandenganlah membangun negeri tercinta. Tidak ada kata mundur bagi

kesejahteraan negeri dan rakyat kita. Garis takdir telah ditetapkan, amanah telah dipundak, janji telah diucapkan, semangat telah ditebar. Merdeka!!!

Sementara itu, pimpinan DPRD Kota Baubau yang secara resmi diambil sumpahnya oleh Wakil Ketua PN Baubau pada sidang paripurna tersebut yakni Ketua Ardin Jufri SE, Wakil Ketua Natas Aryu Prawira Tamim, SM, MM, Wakil Ketua Adriansyah Farmin, ST, Turut hadir anggota DPD RI Dr H Amirul Tamim, M.Si dan unsur Forkompinda serta tamu undangan lainnya.(*)

Menko Yusril: Nasib Mary Jane di Tangan Filipina Jika Telah Dipindah

li ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11).

Setelah berada di bawah kewenangan Filipina, kata Yusril, tak menutup kemungkinan Mary Jane akan terbebas dari hukuman mati lewat grasi dari Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr.

Yusril mengatakan pemberian grasi tersebut bisa saja terjadi dikarenakan saat ini hukum pidana yang ada di Filipina telah menghapuskan pidana mati.

“Mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seu-

mur hidup,” tuturnya.

“Mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina,” imbuhnya.

Kendati demikian, Yusril menegaskan proses pemindahan terhadap narapidana kasus penyelundupan narkoba Mary Jane baru bisa dilakukan apabila syarat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dipenuhi oleh Pemerintah Filipina.

La menyebut ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh Filipina selaku negara yang mengajukan permohonan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

Pertama, mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya

yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Kedua, napi tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia. Ketiga, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan.

“Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemko Kumham Imipad dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr mengatakan Mary Jane akan kembali ke Filipina, setelah lebih dari satu dekade berdiplo-

masi dan berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusinya.

“Mary Jane Veloso akan pulang,” tulis Bongbong dalam ungghannya.

Presiden Bongbong pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan pihak berwenang atas kerja sama yang berbuah kepulangan Mary Jane ini.

“Hasil ini merupakan cerminan dari kedalaman kemitraan negara kita dengan Indonesia, yang bersatu dalam komitmen bersama untuk keadilan dan kasih sayang,” kata Bongbong.

“Terima kasih, Indonesia. Kami menanti untuk menyambut kepulangan Mary Jane,” lanjutnya. (*)

Di KTT G20, Prabowo Beber Alasan RI Pindah Ibu Kota Negara

Prabowo mengatakan muka air laut di utara Jawa naik 5 centimeter per tahun. Menurutnya, hal itu yang membuat Indonesia harus memindahkan ibu kota.

“Indonesia menderita efek perubahan iklim secara langsung. Wilayah pesisir kami sekarang tergenang oleh kenaikan muka air laut. Kami terpaksa memindahkan ibu kota negara kami,” kata Prabowo pada sesi ke-

tiga KTT G20 di Brazil, Selasa (19/11) waktu setempat.

Prabowo juga bercerita Indonesia kehilangan ratusan ribu hektare lahan produktif. Para petani dan nelayan Indonesia, kata Prabowo, mengalami masa-masa sulit.

Menurutnya, kondisi ini akan memperparah kelaparan dan kemiskinan. Dia berkata tak ada jalan lain bagi Indonesia selain berbenah.

Prabowo mengatakan Indonesia berkomitmen mengurangi temperatur bumi dengan memakai energi terbarukan. Indonesia mulai menjajaki bahan bakar dari sawit.

Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan energi geothermal dari panas bumi. Indonesia juga mencoba mengelola sinar matahari karena limbah sebagai negara khatulistiwa.

“Kami berencana me-

mensiunkan pembangkit listrik tenaga uap dan semua pembangkit listrik bertenaga fosil dalam waktu 15 tahun. Kami berencana membangun lebih dari 75 gigawatt energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” ujarnya.

“Kami punya beberapa sumber energi terbarukan lainnya, itulah kenapa kami sangat optimistis bisa mencapai net zero sebelum 2050,” ucapnya.(*)

Cadewas KPK Kritik Penyadapan Tanpa Izin hingga Minta Wajib LHKPN

nyadapan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik.

Mirwazi menilai putusan MK itu justru akan membuat penyidik KPK lebih rentan melakukan pelanggaran dalam menydik suatu kasus.

“Ini yang sangat kita sayangkan. Kenapa ini dicabut oleh MK? sedangkan pelanggaran yang banyak terjadi dari pegawai penyelidikan tersebut, itu dipenyadapan,” kata Mirwazi dalam fit and proper test Calon Dewas KPK bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11).

Mirwazi menegaskan KPK tidak boleh sewenang-wenang melakukan penyadapan, dan penggeledahan terhadap seseorang dalam suatu kasus.

Bahkan, Ia menuding penyidik KPK kerap melakukan penggeledahan terhadap orang yang tidak melakukan tindak pidana.

“Ada yang menggeledah rumah orang tuannya harus disita. Sedangkan dari penyidikan, penyelidikan tidak terarah ke orang tuanya,” tutur dia.

“Indikasinya nanti penyidik tersebut bisa mendapat keuntungan dari penggeledahan tersebut, dari penyitaan yang tidak kaitannya dengan tindak pidana,” sambungnya.

Oleh karena itu, Mirwazi mengatakan putusan MK itu akan mempersulit Dewas KPK dalam mengawasi tim penyidik KPK melakukan pemberantasan korupsi.

Adapun penghapusan kewenangan itu berdasar pada Putusan MK 71/PUU-XVII/2019 yang menguji materil UU Tipikor.

Dalam kesempatan itu Mirwazi juga memba-

has peran Dewas sesuai revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

Ia menyebut bahwa masyarakat selama ini bangga dengan revisi UU KPK tersebut.

Menurut Mirwazi, lewat revisi itu, KPK akhirnya bisa membentuk organisasi yang bisa mengawasi kerja-kerja KPK, yang di dalamnya berjumlah lima orang.

“Masyarakat sangat bangga dengan perubahan UU KPK itu Bapak. Kenapa saya bilang sangat bangga? Karena dalam UU Nomor 19/2019 tersebut, perubahan dari UU Nomor 30/2002 yang mengamankan di situ perubahan menjadi adanya Dewas,” kata dia.

Mirwazi menegaskan bahwa tugas Dewas untuk mengawasi KPK, bukan dalam arti membatasi kegiatan KPK. Namun, Dewas bertugas untuk mengawasi apabila terjadi pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan maupun pegawai KPK.

“Jadi, di sini, yang biasanya terjadi dalam penyelidikan, penyidikan itu terjadinya banyak pelanggaran. Karena kewenangan yang sangat besar dimiliki oleh pimpinan KPK dan pegawai KPK inilah yang diperlukan pengawasan yang melekat,” kata Mirwazi.

Dia menilai masalah antara Dewas dan KPK terdahulu karena ego sektoral. Menurut dia, hal itu akan menjadi pembelajaran bagi Dewas ke depan.

Dia menduga ada kesalahan persepsi antara dua organisasi tersebut. Misalnya, Dewas menilai mereka berhak untuk mengawasi KPK sampai proses penyidikan. Sementara KPK, merasa Dewas tak memiliki kewenangan tersebut.

“Dewas merasa dia harus mengawasi sampai ke dalamnya penyidikan, sedangkan pimpinan KPK merasa dia paling hebat, aku paling

jago, aku pimpinannya, aku yang pegang anggarannya,” kata Mirwazi.

“Ini yang akan kita bentuk ke depan ini, duduk bersama membuat aturan2 bersama,” imbuhnya.

Insan KPK harus lapor harta kekayaan

Sementara Cadewas KPK Wisnu Baroto ingin seluruh pegawai dan pimpinan lembaga anti-rasuah mengumumkan harta kekayaan yang mereka miliki.

Wisnu menjelaskan hal tersebut sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan integritas seluruh insan KPK yang menurutnya tengah menjadi sorotan.

“Kemudian deklarasi harta kekayaan, yaitu meliputi mewajibkan seluruh pegawai pimpinan KPK untuk mendeklarasikan harta kekayaan secara berkala. Deklarasi ini harus diaudit,” kata Wisnu.

Ia juga berharap seluruh insan KPK menampilkan gaya hidup yang sederhana dan menjauhi kehidupan yang bermewah-mewahan.

Wisnu menilai gaya hidup sederhana dapat menghindarkan seluruh insan KPK dari fitnah dan prasangka buruk yang kerap muncul.

“Kemudian bertanggungjawab, pemimpin disini harus memiliki panutan yang baik adalah pemimpin yang siap menanggung akibat dari perbuatan atau kebijakan yang dilakukan tidak buang badan atau menyalahkan orang lain atau bawahannya,” tutur dia.

Tak hanya itu, Wisnu ingin pimpinan KPK periode selanjutnya menjadi pemimpin yang jujur dengan menunjukkan perbuatan dan ucapan yang selaras.

“Bertindak jujur bukan hanya sekadar tidak berbohong tetapi juga harus bertindak sesuai dengan nilai dan etika yang standar,” ujar dia.(*)

Prodi S2 Ilmu Perikanan dan Fakultas IKIP Unhas Makassar Praktek Lapang Terpadu di Kota Baubau

bau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata Selasa (19/11/2024).

Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi,

SP, M.Si memberikan apresiasi kepada Unhas yang telah memilih Kota Baubau sebagai lokasi praktek lapang terpadu sebab kalau memilih Baubau dan membandingkan den-

gan Sulawesi Selatan yang pembangun perikanan mungkin agak jauh. Tapi ini adalah komparasi yang baik untuk memberikan masukan buat pemerintah Kota Baubau dan Bu-

ton untuk membangun perikanan ke depan. “Saya kira ini sangat kita butuhkan dan terima kasih. Ini sangat kami nantikan, seperti apa masukkannya dan apa tindak lanjut yang bisa kita

lakukan ke depan untuk pembangun perikanan di Baubau.

Menurut Dr H Muh Rasman Manafi, membangun perikanan Baubau tidak akan bicara produksi, namun yang dibicarakan adalah penyimpanan, pengelolaan, logistik atau mungkin rantai dingin di Baubau. Namun demikian, jika bicara produksi maka Buton Selatan, di Buton Tengah, di Wakatobi yang menjadi perhatian.

Oleh sebab itu, dari konsep kewilayahan saja sudah menempatkan Baubau bukan sebagai wilayah produksi, hanya wilayah pengumpul atau wilayah distribusi. Sehingga,

mendorong pengelolaan perikananannya Baubau sangat diharapkan masukan dari praktik kerja lapangan ini, bagaimana baiknya rantai dingin perikanan atau rantai logistik perikanan atau sistem pengelolaan dan penyimpanan hasil laut di Baubau.

Sementara itu, Ketua Departemen Perikanan Unhas Dr.Fahrul,SPi.,M. Si mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Baubau yang telah bersedia menerima rombongan Unhas yang akan melakukan praktek kerja dan workshop promosi dan sosialisasi program magister dan program doktor di Kota Baubau.

“Insha Allah kami berada di Kota Baubau

kurang lebih 5 hari, tujuan kami didasari atas penilaian dan pengamatan di Kota Baubau terkait dengan praktek kerja lapangan mahasiswa S2 Ilmu Perikanan .Ada beberapa destinasi untuk praktek seperti di Wameo yang berkaitan dengan penangkapan kemudian ada ikan katapai di Sula. Ada juga budidaya mabe dan pupuk laut kemudian ada hutan mangrove, inilah yang berdasar kami kenapa kami berkunjung ke Baubau sebagai bahan perbandingan dan pengamatan kami di daerah-daerah,” tutupnya. (*)

DPR Resmi Tetapkan Daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025

Laporan: Hadi

JAKARTA-Rapat Paripurna DPR kedelapan masa sidang I 2024-2025 resmi menetapkan daftar 41 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Jumlah itu berdasarkan hasil ketetapan di Badan Legislasi (Baleg) DPR sehari sebelumnya yang turut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Senin (18/11) malam.

“Apakah laporan Baleg DPR RI terhadap hasil pembahasan Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas 2025 tersebut dapat disetujui,” ujar Wakil Ketua DPR, Adies Kadir selaku pimpinan Paripurna.

“Setuju,” ujar peserta Paripurna kompak.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 RUU merupakan usulan komisi-komisi di DPR. Mulai dari Komisi I hingga XIII. Lalu ada pula usulan Baleg DPR sebanyak 12 RUU, 3 RUU usulan perseorangan, 1 RUU usulan DPD, dan 9 RUU usulan pemerintah.

Di luar itu, ada pula tambahan lima RUU yang bersifat kumulatif terbuka.

Selain 41 RUU Prolegnas Prioritas, ada pula 178 RUU yang masuk daftar Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Salah satunya, RUU Perampasan Aset.

Berikut daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas yang disahkan dalam Paripurna.

Usulan Komisi-Komisi

1. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (komisi I)

2. RUU tentang Perubahan atas UU No-

mor 29 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Komisi II)

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Komisi III)

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

5. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Komisi V)

7. RUU atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Komisi VI)

8. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Komisi VI)

9. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Komisi VII carry over)

10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (Komisi VIII)

11. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Komisi VIII)

12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Komisi IX)

13. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Komisi X)

14. RUU tentang Pengampunan Pajak atau tax amnesty (Komisi XI)

15. RUU tentang Energi Baru Dan

Energi Terbarukan (Komisi XII carry over)

16. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Komisi XIII)

Usulan Baleg

17. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Komcad)

19. RUU tentang Komoditas Strategis

20. RUU Pertekstilan

21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia

22. RUU tentang PPRT

23. RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern

24. RUU tentang BPPI

25. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Carry over)

26. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

27. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

28. RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

29. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (DPR dan DPD)

30. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (diusulkan

Melly Goeslaw, F-Gerindra)

31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

Usulan DPR dan DPD

32. RUU tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (diusulkan F PDIP, PKB, DPD)

Usulan pemerintah

33. RUU tentang Hukum Acara Perdata (carry over)

34. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika

35. RUU tentang Desain Industri

36. RUU tentang Hukum Perdata Internasional

37. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (carry over)

38. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

39. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

40. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagapenggunaan

41. RUU tentang Daerah Kepulauan (diusulkan DPD)

RUU Kumulatif Terbuka

1. Daftar RUU kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional

2. Daftar RUU kumulatif terbuka akibat putusan MK yakni, RUU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan RUU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (Carry over)

3. Daftar RUU kumulatif terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota

5. Daftar RUU Kumulatif terbuka tentang Perppu. (*)

Kolonel Betya Lukman dari TNI AU Jadi
Ajudan Wapres Gibran



Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA-TNI Angkatan Udara menyatakan Kolonel Pnb Betya Lukman telah ditunjuk sebagai ajudan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Ardi Syahri mengatakan Betya sudah bertugas sebagai ajudan dalam beberapa kegiatan wapres.

“Kolonel Pnb Betya Lukman, penerbang helikopter dari Lanud Atang Sendjaja Bogor,” kata Ardi saat dikonfirmasi, Rabu (20/11).

Betya pernah men-

jabat sebagai Komandan Skadron 8 Lanud Atang Sendjaja.

Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Lanud Hang Nadim, Batam. Betya juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi Lanud Atang Sendjaja.

Selain dari TNI AU, ajudan Wapres Gibran juga dipilih masing-masing satu dari TNI AL, TNI AD, dan Polri.

Dari TNI AD, Letkol Inf Devy Kristiono telah ditunjuk. Devy adalah mantan Dandim 0735/Surakarta.

Sementara itu, empat Perwira Menengah (Pamen) dari TNI dan Polri disebut telah ditunjuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai ajudan.

Keempat perwira yang digadagadag telah disetujui menjadi ajudan Presiden itu merupakan Kombes Ahrie Sonta dari Polri, Kolonel Kolonel Inf Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Kolonel Pnb Anton Palaguna dari TNI AU dan Letkol Laut (P) Romi Habe Putra dari TNI AL. (*)



Posko ‘Lapor Mas Wapres’ menerima 400 aduan sejak dibuka pada 11 November 2024. Sebagian telah ditindaklanjuti.

Hasan merinci sebagian besar laporan warga yang masuk terkait kasus pertanahan yang mencapai 50 persen pengaduan.

Ia mengatakan laporan warga mengenai kasus pertanahan akan diserahkan ke kementerian terkait untuk diselesaikan. Pasalnya, kasus pertanahan butuh proses untuk ditindaklanjuti lantaran harus dilengkapi berbagai data-data.

“Kan diserahkan ke ATR/BPN nanti,” lanjutnya.

Hasan menurut-

kan kanal pengaduan ‘Lapor Mas Wapres’ ingin memperkuat respons para administrator di daerah agar lebih cepat menyelesaikan laporan.

Terlebih, Lapor Mas Wapres ini terintegrasi dengan kanal pengaduan LAPOR! yang jangkauannya hingga ke daerah.

“Sekarang atensinya diperkuat nih dengan kehadiran Lapor Wakil Presiden. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini justru memperkuat atensi bahwa responsivitas pemerintah ter-

hadap aduan-aduan masyarakat sekarang harus semakin cepat, harus semakin tinggi. Jadi ini yang perlu ditekankan nanti,” kata dia.

Program ‘Lapor Mas Wapres’ diluncurkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2024. Warga bisa datang langsung ke posko pengaduan di Istana Wapres untuk melaporkan masalah atau mengontak melalui nomor WhatsApp 08111-704-2207. (Ilman)

8 Hari Dibuka, Posko ‘Lapor Mas Wapres’ Gibran Terima 400 Aduan

JAKARTA-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menerangkan ada sekitar

400 laporan warga yang masuk ke kanal pengaduan ‘Lapor Mas Wapres’ sejak dibuka pada 11 No-

vember 2024. Dari jumlah itu, 75 aduan telah diselesaikan.

“Baru berapa minggu ini? Dari 400

sudah 75-an [laporan] yang selesai,” kata Hasan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/11).

Workshop Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Dorong Pengelolaan Mangrove Lestari di Sulawesi Tenggara



SULTRA, BP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Kehutanan Sultra menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk Pengelolaan Mangrove Lestari pada Selasa, 19 November 2024, di Hotel Claro Kendari. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Gubernur Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan bahwa hutan mangrove memiliki potensi ekonomi dan ekologi yang besar. Selain menjadi habitat berbagai makhluk hidup, hutan mangrove juga berfungsi melindungi wilayah pesisir. Namun, tekanan akibat pembangunan, konversi lahan, dan aktivitas manusia telah menyebabkan degradasi ekosistem mangrove. "Kerusakan hutan mangrove jika dibiarkan akan menimbulkan

kerugian besar, baik secara ekonomi maupun lingkungan," tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Kehutanan RI, serta peserta dari TNI/Polri, OPD Provinsi Sultra, perguruan tinggi, kelompok tani mangrove, dan pegiat lingkungan. Hadir pula sejumlah tokoh, seperti Kepala Balai DAS Sampara, Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan UHO, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO, serta Direktur Yayasan Hutan Biru.

Ketua Panitia, La Ode Yulardhi, yang juga menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sultra, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan Balai Kehutanan Masyarakat Desa (BKMD) serta meningkatkan koordinasi antar-stakeholder dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan koordinasi dalam memperkuat kelembagaan BKMD Sultra, serta memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan mangrove lestari dan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan hasil mangrove.

Sekda Sultra juga menyoroti pentingnya strategi persuasif, edukatif, dan fasilitatif dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan mangrove. Strategi ini meliputi pembinaan, pelatihan pembuatan bibit mangrove, pengolahan hasil mangrove, serta pemberian bantuan usaha terkait.

Menurut data Peta Mangrove Nasional 2023, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas hutan mangrove mencapai 93.564,98 hektare, yang terdiri dari 64.995,53 hektare eksisting mangrove dan 28.609,45 hektare potensi habitat mangrove. "Kebudayaan mangrove sangat vital secara

ekonomi, ekologi, maupun pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pengelolaan mangrove harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan dan dilakukan secara terpadu," ujar Asrun Lio.

Sebagai wujud komitmen, Pemerintah Provinsi Sultra telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2022. KKMD bertugas mengoordinasikan kebijakan dan program pengelolaan mangrove lintas sektor.

Workshop ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, akademisi, swasta, dan masyarakat, untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan hutan mangrove secara lestari. "Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memulihkan ekosistem mangrove dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," tutup Asrun Lio. (MASHURI)

Pemprov. Sultra Hadiri Rakor Inflasi dan Bencana Hidrometeorologi secara virtual



SULTRA, BP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Acara ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam rapat, hadir narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Wakil Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan SAR Nasional, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendagri.

Dari pihak Pemprov Sultra, turut hadir Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, perwakilan Bulog,

Karantina Kendari, dan dinas-dinas terkait lainnya.

Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kesiapan menghadapi dua agenda besar, yakni potensi bencana hidrometeorologi dan pelaksanaan Pilkada serentak. Pilkada serentak dijadwalkan pada Rabu, 27 November 2024, yang telah diusulkan sebagai hari libur nasional sesuai undang-undang.

"Kita perlu mengantisipasi potensi lonjakan mobilitas masyarakat, khususnya pada masa kampanye hingga hari tenang (24-26 November). Koordinasi dengan Bulog dan distributor pangan juga sangat penting, mengingat adanya fenomena aksi borong bahan pokok selama masa pemilu. Selain itu, kita juga harus bersiap menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru," ujar Tito.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa kondisi cuaca di Indonesia akhir tahun ini dipengaruhi oleh fenomena La Nina lemah yang akan berlangsung hingga Maret 2025. Periode ini bersamaan dengan musim hujan, terutama pada puncaknya pada Januari-Februari 2025.

"Potensi bencana

hidrometeorologi basah, seperti banjir, banjir bandang, banjir pesisir (rob), tanah longsor, angin kencang, dan kilat/petir, perlu diwaspadai. Sebanyak 15% wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara bagian timur dan utara, diprediksi mengalami curah hujan di atas normal," jelas Dwikorita.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa pada Oktober 2024 terjadi kenaikan harga pada sejumlah komoditas, seperti telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, dan emas perhiasan.

Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) November 2024 hingga 16 November, salah satu wilayah dengan kenaikan IPH tertinggi adalah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, yang mencapai 2,60%. Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah daging ayam ras, cabai rawit, ikan gembung, dan berbagai jenis ikan lainnya.

Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada M2 November 2024 lebih banyak dibandingkan yang mengalami penurunan, menunjukkan dinamika harga bahan pokok yang memerlukan perhatian lebih. (*)

Pemkab Buton Launching dan Gelar Bimtek Aplikasi Srikandi



Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, secara resmi meluncurkan aplikasi Srikandi di Aula Kantor Bupati Buton pada Selasa, 17 September 2024. Peluncuran aplikasi ini juga dirangkai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berlangsung selama dua hari, hingga 18 September 2024.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Buton yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, H. Abdul Rais, S.P. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa aplikasi Srikandi diharapkan dapat segera diterapkan di seluruh OPD dan kecamatan di Kabupaten Buton, guna meningkatkan efisiensi administrasi tanpa menggunakan kertas. “Aplikasi ini sangat penting untuk memudahkan pekerjaan kita, teru-

tama dalam mengelola administrasi dan arsip secara digital,” ujarnya.

Direktur Kearsipan Daerah I, Drs. Hilman Rosmana, M.Hum., turut hadir secara daring. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penerapan aplikasi Srikandi merupakan program nasional yang bertujuan untuk memodernisasi sistem kearsipan di Indonesia. Aplikasi ini mendukung digitalisasi dan tata kelola arsip yang lebih baik serta lebih ra-

mah lingkungan.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan pemateri dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kendari. Para peserta terdiri dari admin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan kecamatan se-Kabupaten Buton. Diharapkan setelah Bimtek ini, para peserta mampu mengoperasikan dan mengimplementasikan aplikasi Srikandi secara optimal di unit kerja masing-masing.(*)

Kominfo dan Bappeda Progres Pengisian Modul E-Walidata Operator OPD

Pewarta: Rahim

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Koimnfo dan Persandian Kabupaten Buton dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus melakukan tahapan-tahapan dan Langkah untuk mempercepat penginputan Modul E-Walidata. Untuk itu Koordinator dan Walidata Kabupaten Buton itu menggelar pertemuan terkait progres pengisian modul E-Walidata bagi para operator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor Bappeda, Takawa, Pasarwajo, Rabu pagi, 25 September 2024.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj.) Bupati Buton yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten



Buton, Drs. La Ode Muhidin Mahmud. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya optimalisasi pengisian data melalui E-Walidata untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah yang berbasis data akurat.

Kegiatan tersebut dipandu langsung Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan Publik Diskominfo Buton, Wa Ode Evay-

anti, S.Kom., Kepala Bidang Bappeda, Mer-ye Alexander Donggi Hanas, S.P. Peserta terdiri para operator e-walidata OPD.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap OPD dapat menyelesaikan pengisian modul E-Walidata dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Modul ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan yang aku-

rat dan terintegrasi di Kabupaten Buton, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada akhir acara, seluruh peserta diimbau untuk segera menyelesaikan pengisian data dan terus berkoordinasi dengan tim E-Walidata guna menghindari kendala teknis dan administratif.(*)

Ahmad Sabir Pimpin Apel gabungan ASN Buteng



Laporan : Ardi

BUTENG, BP-Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda), Ahmad Sabir memimpin apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Buton Tengah, di pelataran halaman Kantor Bupati Buteng, Labungkari, Senin (30/9/2024).

Dalam arahnya, Ahmad Sabir menyampaikan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian seluruh ASN, terutama terkait dengan tahapan Pilkada. Ia menegaskan bahwa seluruh ASN harus tetap menjaga netralitas dalam menghadapi

Pilkada tersebut.

Kemudian Ia menambahkan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), akan terus diberikan sebagai insentif, namun hal ini harus diimbangi dengan disiplin kerja dan peningkatan kinerja.

“ASN diharapkan menjalankan tugasnya dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan yang ada”,ujarnya.

Memasuki triwulan terakhir tahun anggaran 2024, Asisten I Sekda juga menekankan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran. Ia mengingatkan bahwa, seluruh OPD harus memper-

cepat realisasi anggaran agar target serapan dapat tercapai sebelum akhir tahun.

Terakhir, dalam amanatnya, Ahmad Sabir menyampaikan informasi mengenai pelantikan anggota DPRD Buteng baru hasil Pemilihan Legislatif (Pilcaleg) yang akan segera dilakukan. Ia mengajak seluruh ASN untuk tetap fokus dalam menjalankan tugas pelayanan publik di tengah dinamika politik yang berlangsung.

Apel ini di hadiri oleh para Pejabat eselon II, III, IV dan staf lingkup Pemkab Buteng.(*)

Pj Sekda Buteng Kostantinus Bukide Hadiri Penilaian Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sultra



Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide menghadiri kegiatan penilaian gerakan PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Sultra, di Desa Wasilomata I, Kecamatan Mawasangka, Kamis (26/9/2024).

Tim penilaian 10 Program PKK tingkat Provinsi Sultra bersama rombongan dipimpin oleh Ibu Nurlita Irawan Laliasa, yang bertindak sebagai ketua Pokja 2 TP PKK Provinsi Sultra. Hadir dalam kegiatan ini, sejumlah kepala OPD, Camat Mawasangka, Kepala Desa/Lurah, serta pimpinan organisasi wanita.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Kostantinus Bukide menyampaikan apresiasi kepada tim penilai yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung kembali di Buton Tengah.

“Melalui program ini, kita berupaya mening-

katkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat Buton Tengah. Lomba ini menjadi sarana untuk mengepresikan kreativitas dan inovasi dalam menerapkan program PKK”,ujar Pj Bupati.

Pj Bupati juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah melakukan berbagai persiapan, termasuk pelaksanaan program-program yang kreatif dan inovatif, guna menyambut penilaian yang dilakukan pada hari ini.

“Kami berharap tim penilaian dapat memberikan penilaian yang objektif dan konstruktif. Selain itu, kami berharap dapat menjalin kerja sama yang lebih baik kedepan untuk pengembangan program-program PKK yang lebih efektif”, tambahnya.

Pj Bupati menekankan

an pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, PKK dan masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Buton Tengah.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong peningkatan kualitas program PKK di Kabupaten Buton Tengah dan mempererat hubungan antar berbagai elemen masyarakat serta pemerintah.

“Saya berharap melalui lomba ini, kita dapat menemukan ide-ide baru yang dapat diterapkan dilapangan untuk kemajuan bersama. Selain itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada 2024 dengan penuh kesejukan dan perdamaian”,tutupnya. (Ardi)

Indonesia Tunjukkan Kepemimpinannya Dalam Penanggulangan TBC Dengan Pengembangan Vaksin Baru

BALI-World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengadakan konsultasi nasional pertama tentang vaksin-vaksin tuberkulosis (TB) baru di Bali.

Diadakan sebelum Union World Conference on Lung Health, pertemuan ini berfokus pada potensi dampak vaksin-vaksin TB baru untuk orang dewasa dan remaja, pertimbangan penggunaannya di dalam program kesehatan, kemungkinan skenario pembiayaannya, dan bukti yang dibutuhkan untuk introduksi vaksin ini di Indonesia.

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pengembangan vaksin-vaksin TB baru untuk orang dewasa dan remaja serta upaya persiapan pembiayaan dan akses vaksin dalam payung TB Vaccine Accelerator Council WHO.

Vaksin-vaksin TB baru sangat dibutuhkan untuk mengatasi beban TB di Indonesia dan di dunia. Untuk itu, Indonesia berpartisipasi dalam uji klinis fase 3 untuk kandidat terdepan vaksin TB yang sedang dikembangkan, yaitu M72/AS01E.

Jika berhasil, vaksin ini dapat menjadi vaksin TB pertama yang disetujui dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Hasil awal menunjukkan bahwa vaksin ini memenuhi preferred product characteristics (preferensi karakteristik produk) WHO.

Jika kemanjurannya¹ atau efikasi² dapat dipastikan dalam uji klinis tingkat lanjut ini, hal ini memungkinkan introduksi vaksin TB baru untuk orang dewasa dan remaja dilakukan pada tahun 2030.

Mengenai pertemuan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, “Presiden telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mempercepat respons kita dalam menurunkan TB sebanyak 50% dalam waktu lima tahun. Lebih dari satu juta orang meninggal akibat TB di seluruh dunia setiap tahunnya, dan jumlah kematian yang diakibatkan TB dalam sepuluh tahun terakhir terakhir jauh melebihi jumlah kematian akibat COVID-19. Dengan hadirnya vaksin-vaksin TB baru, ini adalah kesempatan penting bagi kita untuk memperkuat upaya kita dan menyelamatkan lebih banyak nyawa.”

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Rizka Andalusia mengatakan, “Indonesia bangga dapat berpartisipasi aktif dalam fase 3 uji klinis kandidat vaksin M72/AS01E, yang dapat menjadi terobosan penting dalam upaya global penanggulangan TB. Dengan berkontribusi pada pengembangan vaksin yang menjanjikan ini, kita tidak hanya mengambil langkah penting untuk melindungi masyarakat kita sendiri tetapi juga membantu mendorong solusi yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Keterlibatan kita dalam uji klinis ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mempercepat kemajuan penurunan beban TB dan mendukung inovasi yang dapat membawa kita lebih dekat menuju pemberantasan penyakit ini.”

Pertemuan ini juga melibatkan perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pember-



dayaan Masyarakat, Komite Ahli TB Indonesia, Stop TB Partnership Indonesia, Gates Foundation, Wellcome, Global Health Strategies Indonesia, serta pemangku-pemangku kepentingan nasional, regional, dan global utama lainnya.

Para peserta membahas penelitian vaksin TB, perencanaan kebijakan, dan integrasi vaksin TB baru dalam National Immunization Strategy¹ atau Strategi Imunisasi Nasional² Indonesia, yang dapat mempercepat adopsi vaksin-vaksin TB baru.

Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr N. Paranietharan, mengatakan, “Komitmen Indonesia dalam melawan TB sangat mengesankan, sebagaimana terlihat dari partisipasinya dalam pengembangan dan uji klinis kandidat-kandidat vaksin TB baru. Kandidat-kandidat menjanjikan ini, yang banyak di antaranya berada dalam tahap uji klinis tingkat lanjut, dapat secara signifikan menurunkan penularan TB dan menyelamatkan jutaan nyawa. WHO bangga bekerja dengan Indonesia dan negara-negara dengan beban TB tinggi lain untuk membuat vaksin-vaksin ini tersedia serta mengintegrasikannya ke dalam program-program nasional. Bersama, kita dapat mengambil langkah penting menuju pemberantasan TB dan membangun masa depan yang lebih sehat.”

Vaksin TB baru: Prioritas untuk National Immunization Strategy Indonesia

Laporan TB global 2024 mengonfirmasi bahwa angka kejadian dan penularan tertinggi terdapat pada populasi orang dewasa dan remaja. Pemodelan menunjukkan bahwa vaksin TB untuk remaja dan orang dewasa dengan efektivitas 50% dalam mencegah penyakit diperkirakan akan mencegah antara 37 juta dan 76 juta kasus serta menyelamatkan 4,6 juta hingga 8,5 juta nyawa hingga tahun 2050 di seluruh dunia.

Pada bayi, vaksin yang lebih baik dengan efikasi 80% dapat mencegah 5,8 juta hingga 18,8 juta kasus serta menyelamatkan 0,8 hingga 2,6 juta nyawa dalam jangka waktu yang sama. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa vaksin TB yang aman dan efektif dapat secara signifikan menurunkan jumlah kasus dan kematian TB, di mana vaksin untuk remaja dan orang dewasa lebih berdampak dibandingkan vaksin untuk bayi.

Efektivitas vaksin bergantung pada kinerja vaksin tersebut, lama masa perlindungan yang dihasilkan, kepada siapa vaksin tersebut diberikan, dan seberapa luas distribusinya.

Introduksi vaksin-vaksin TB baru merupakan unsur penting dalam National Immunization Strategy Indonesia, yang menjabarkan tujuan-tujuan imunisasi negara ini dalam lima tahun ke depan.

Investasi untuk vaksin TB serta sistem-sistem pendukung yang diperlukan untuk efektivitas akses dan pelaksanaan imunisasi tidak hanya penting bagi kesehatan tetapi juga menghemat biaya di sebagian besar negara. WHO memperkirakan bahwa setiap 1 dolar AS yang diinvestasikan untuk vaksin TB akan menuai hasil tujuh kali lipat dalam bentuk manfaat kesehatan dan ekonomi di seluruh dunia selama 25 tahun mendatang.

“Seperti yang kita ketahui dari sejarah epidemi-epidemi global dan pemberantasan beberapa penyakit menular, eliminasi penyakit tidak dapat dilakukan tanpa vaksin yang efektif. Vaksin-vaksin TB baru dapat menjadi pencetus perubahan yang nyata dalam upaya melawan penyakit yang telah ada selama ribuan tahun ini, yang membunuh dan mengakibatkan penderitaan bagi jutaan orang di dunia,” tambah Dr Tereza Kasaeva, Direktur Global TB Programme WHO.

Pertemuan ini mengidentifikasi data-data utama dan kesenjangan-kesenjangan bukti yang harus dijawab untuk mengarahkan pengambilan keputusan Indonesia, serta kesempatan-kesempatan penting untuk mempercepat introduksi vaksin TB baru yang aman dan efektif di Indonesia. Partisipasi aktif pemerintah Indonesia dalam uji-uji klinis dan diskusi-diskusi ini menempatkan bangsa ini sebagai pemimpin dalam upaya eliminasi TB global.

Tentang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertekad melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga negara Indonesia, memastikan akses layanan kesehatan yang bermutu, dan mempromosikan inisiatif-inisiatif kesehatan masyarakat. Melalui upaya kolaboratif dengan pemangku kepentingan dan masyarakat di seluruh negeri, Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat infrastruktur kesehatan, pencegahan penyakit, dan akses layanan kesehatan, demi meningkatkan kesehatan keseluruhan semua orang Indonesia. Ketahui lebih banyak tentang inisiatif dan kontribusi Kementerian Kesehatan di kemkes.go.id atau tetap terhubung melalui kanal-kanal media sosialnya.

Tentang WHO

Demi kesejahteraan semua orang dan dengan dipandu ilmu pengetahuan, World Health Organization memimpin dan memperjuangkan upaya-upaya global untuk memberi setiap orang, di mana pun, kesempatan yang sama untuk hidup yang aman dan sehat. Kami adalah badan PBB untuk kesehatan yang menghubungkan bangsa-bangsa, mitra-mitra, dan orang-orang di garis depan di lebih dari 150 lokasi “ memimpin respons dunia terhadap kedaruratan kesehatan, mencegah penyakit, mengatasi akar masalah kesehatan, dan memperluas akses obat-obatan dan pelayanan kesehatan. Misi kami adalah mempromosikan kesehatan, menjaga dunia tetap aman, dan melayani kelompok rentan. <https://www.who.int> (*Kemkes*)

 Kritik, Lugas, Independen Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi	Pemimpin Umum : Fauzan NWA Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi Redpel : Hengky TA Korlip : Hengky T.A Redaktur : Alyakin, Kasrun Reporter : Rahim, ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisna	Layouter : Rlirin Pracetak : Aditya Cetak : Jamal	Penerbit : PT. Faren Grafika Komisaris : Erna Agule Direktur Utama : Andina Latief, SKM Manager Keuangan : Nabila D.A Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan Kepala Sirkulasi : Jamal Administrasi : Salvana Security :	Kepala Biro Wakatobi : Risman Kepala Biro Buton Utara : Fauzan Kepala Biro Buton : Rahman Kepala Biro Busel : Salvana Kepala Biro Buteng : Andini Kepala Biro Bombana : _ Kepala Biro Sultra : _ Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun, Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul Baubau : Jaya Agen Pasarwajo : Agen Butur : Samrihan Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim, Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-
	Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau			

Kapolri Luncurkan Gugus Tugas Khusus Dukung Program Swasembada Pangan



Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri peluncuran atau launching Gugus Tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Pewarta: Alwan

JAKARTA- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Gugus Tugas khusus untuk mendukung program ketahanan pangan yang tertuang dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Sigit mengatakan pembentukan Gugus Tugas itu secara khusus dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri terkait program swasembada pangan.

“Gugus Tugas Polri ini diluncurkan guna mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11).

Sigit menjelaskan nantinya Gugus Tugas khusus itu akan dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Irjen Dedi Prasetyo. Selain itu, ia menyebut dalam pelaksanaannya Gugus Tugas akan bekerja sama dengan TNI hingga kementerian terkait lainnya seperti Kemendes.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan ada dua program khusus yang akan menjadi program Gugus Tugas Polri. Pertama, kata dia, Gugus Tugas akan berperan dalam program pekarangan lahan bergizi. Ia menjelaskan anggota Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah akan membantu masyarakat agar dapat memanfaatkan pekarangan menjadi lahan produktif.

“Sampai dengan saat ini di 34 wilayah Polda terdapat 7.471 pekarangan yang siap dialihfungsikan menjadi lahan produktif,” jelasnya. Kedua, Sigit mengatakan Gugus Tugas Polri juga akan menjalankan program pemanfaatan lahan produktif lewat kerjasama dengan kelompok tani dan sukarelawan.

“Saat ini terdapat lahan tidur seluas 13.217 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia dan siap digunakan sebagai lokasi pertanian, peternakan, dan perikanan,” tuturnya. (*)

Anggota DPR: Saya Setuju dengan Pak Luhut, OTT Itu Kampungan



Anggota Komisi III DPR, Hasbially Ilyas mengaku sependapat agar operasi tangkap tangan (OTT) mestinya tidak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pewarta: Alwan

JAKARTA- Anggota Komisi III DPR, Hasbially Ilyas mengaku sependapat agar operasi tangkap tangan (OTT) mestinya tidak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ilyas mengaku setuju dengan pernyataan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut OTT kampungan. Menurut dia, OTT selama ini hanya merugikan negara. Pernyataan itu disampaikan Ilyas dalam lanjutan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Wisnu Baroto, Rabu (20/11).

“Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara,” kata Ilyas.

Ilyas mengaku pernah bertanya ke salah satu pimpinan KPK bahwa OTT bisa memerlukan waktu hingga satu tahun. Dengan kurun waktu itu, dia mempertanyakan anggaran yang dihabiskan. Padahal, ada cara lebih efektif yang bisa digunakan.

“Ini kan permasalahan di kita seperti ini, KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap,” ujarnya. Ilyas mendorong Wisnu untuk bisa mengambil sikap ekstrem dengan menghapus OTT jika terpilih menjadi Dewas KPK. KPK bisa melakukan cara lebih efektif misalnya

Kasus Firli Bahuri ‘Mangkrak’, Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Digugat

JAKARTA- Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta digugat buntut penanganan kasus dugaan pemerasan yang menjerat eks Ketua KPK, Firli Bahuri yang tak kunjung tuntas. Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan terdaftar dengan Nomor 116/Pid.Pra/2024/PN JKT. SEL.

“Bahwa Termohon I dan Termohon II saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (mantan Menteri Pertanian RI) yang diduga dilakukan Firli Bahuri,” kata Wakil ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho dalam keterangannya, Rabu (20/11).

Namun, proses hukum terhadap Firli ini justru berlarut dan tak kunjung tuntas. Padahal, Firli telah menyandang status tersangka sejak 22 November 2023.

Dalam perkara itu, Firli diketahui juga sempat melakukan upaya praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka. Namun, berkas perkara Firli juga telah berulang kali dikembalikan oleh Kejati DKI ke Polda Metro Jaya dan tak kunjung dinyatakan lengkap.

“Bahwa dengan digantungnya perkara, maka penyidikan perkara telah berusia hampir satu tahun. Kondisi ini jelas merugikan korban tindak pidana korupsi (negara dan rakyat Indonesia) karena tidak

terdapatnya kepastian hukum dan kepastian keadilan,” ucap Kurniawan.

“Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan ‘Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,’” imbuhnya.

Selain itu, Kurniawan juga menyebut langkah Polda Metro Jaya yang tak menahan Firli juga bisa dianggap bahwa penanganan kasus ini terkesan tak serius.

“Bahwa jika para termohon memiliki komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara adil dan transparan, seharusnya para termohon segera melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan dan dilakukan penuntutan pada tersangka/terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tutur Kurniawan.

“Soal terbukti bersalah atau tidaknya dalam perbuatan yang disangkakan, seharusnya merupakan kewenangan hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memutuskannya,” sambungnya.

Atas dasar itu, para pemohon yakni LP3HI dan MAKI menilai wajar apabila Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta didesak untuk segera menyelesaikan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara dan tersangkanya ke pengadilan.

Saat dikonfirmasi, Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan mengaku telah mengetahui dan

menghormati gugatan tersebut.

“Kejati DKI menghormati hak konstitusional warga atau lembaga masyarakat baik yang melakukan gugatan sebagaimana gugatan a quo oleh LP3HI ataupun MAKI,” ujarnya.

Namun, Syahron menyatakan sampai saat ini Kejati DKI Jakarta masih terus menindaklanjuti perkara yang menyeret Firli.

“Di sisi lain perlu kami tegaskan, bahwa penanganan perkara a quo sedang berlangsung sampai saat ini, yaitu pada tahap prapenuntutan (Pasal 14 butir b KUHP),” ucap dia.

Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan penanganan kasus Firli ini masih terus berlanjut.

Ia juga mengklaim penanganan kasus tersebut dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk intervensi.

“Saya pastikan proses penyidikannya masih terus berlangsung dan progresnya sangat baik. Dimana tim penyidik saat ini masih memenuhi petunjuk P-19 dan hasil koordinasi dengan JPU pd Kantor Kejati DKI Jakarta,” tuturnya.

Ade Safri juga menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kejati DKI untuk melengkapi berkas Firli.

“Koordinasi efektif terus dilakukan dengan JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta dalam rangka melengkapi berkas perkara dan komunikasi serta koordinasi berjalan dengan sangat baik sampai saat ini,” kata dia.

(*)

dengan mengingatkan penyelenggara sebelum melakukan korupsi.

“Yang berjalan sampai hari ini, uang negara sudah dirugikan, biaya terlalu mahal dan negara rugi. Bagaimana tanggapan bapak, saya rasa, bagaimana OTT ini kalo bisa tidak ada di negeri ini,” ujarnya.

Merespons hal itu, Wisnu Baroto menilai ada perubahan cara OTT sejak praktik itu pertama di-

lakukan. Wisnu yang merupakan jaksa di awal KPK berdiri, menyebut praktik OTT berbeda dengan yang dilakukan saat ini.

Wisnu bercerita bahwa OTT saat pertama kali dilakukan bahkan hanya memerlukan waktu sehari. Dia tak menjelaskan detail kasusnya. Namun, menurut dia, OTT kala itu murni atas laporan masyarakat. “Jadi, waktu itu be-

gitu ada orang datang bawa tas kami tunggu sebentar, kira-kira 15 menit kami langsung masuk dan grebek. Dan benar tas itu udah beralih ke pejabat yang di kantor itu. Setelah kami buka isinya uang,” katanya.

“Jadi sebetulnya adalah OTT dulu adalah OTT yang pertama seperti itu tidak butuh waktu lama. Tidak membunuh biaya,” imbuh Wisnu. (*)

1



CALON BUPATI
SYARASWATI

CALON WAKIL BUPATI
Drs. H. RASYID
MANGURA, M.H.

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

VISI

MEWUJUDKAN KABUPATEN BUTON YANG MANDIRI, MAJU,
DAN BERDAYA SAING MELALUI OPTIMALISASI
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING.

2. MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.

3. MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN.

4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

5. MENGOPTIMALKAN PARAWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN BUDAYA LOKAL.

6. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF

2



CALON BUPATI
Drs. LA BAKRY, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
ARIS MARWAN SAPUTRA,
S.H.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN
MENUJU INDONESIA EMAS 2045

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) SAINS, TEKNOLOGI DAN TATA RUANG KAWASAN.

2. TRANSFORMASI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).

3. KESETARAAN GENDER, PEMULA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z) DAN PENYANDANG DISABILITAS.

4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, UMKM DAN INDUSTRI KREATIF

5. REFORMASI BIROKRASI, KESADARAN HUKUM DAN TRASPORTASI KEBUAKAN PEMERINTAH DAERAH.

6. PERKUAT PENYELARASAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA.

3



CALON BUPATI
H. LA ODE NAANE

CALON WAKIL BUPATI
H. AKALIM, S.Pd.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GITONG ROYONG

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE, DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BAGI MASYARAKAT BUTON SMART.

2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU MENUJU GENERASI BUTON EMAS.

3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.

4. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KABUPATEN BUTON YANG CERDAS (BUTON SMART CITY).

5. MENGUTAKKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG SALING MENGHARGAI DAN JIWA GOTONG ROYONG.

4



CALON BUPATI
Drs. BASIRAN, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LA ODE RAFIUN, S.Pd.,
M.Si.

PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON MAJU, TERCIPTANYA MASYARAKAT BUTON YANG ADIL DAN MAKMUR DI
TAMBAH DENGAN MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA
KONDISI EKONOMI MASYARAKAT LEBIH BAIK. BUTON BERDAYA SAING, MASYARAKAT
BUTON YANG MEMILIKI KELUANGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENGHADAPI
PERSAINGAN DI MASA YANG AKAN DATANG MENUJU INDONESIA EMAS 2024-2029

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

2. MENINGKATKAN KUALITAS SUBERDAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN MUDA, SERTA TERJANGKAU.

3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF DENGAN PERTIMBANGAN DAYA SERAP TENAGA KERJA, PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.

4. MENINGKATKAN KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BERBAGAI MACAM ANCAMAN DAN GANGGUAN BERLANDASKAN NILAI NILAI FALSAFAH DAN BUDAYA KEBUTONAN DENGAN MENUNJUNG TINGGI NORMA KEAGAMAAN.

5. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA DASAR YANG PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA DAERAH MAJU BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS.

6. MENIMPLEMENTASIKAN ADAT ISTADAT DAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM MENAIKAN KARASITAS DAERAH.

5



CALON BUPATI
Dr. BERE ALI, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI
LAODE MUHAMAD
SUMARLIN BUCHARI, S.E.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BERLIAN MEWUJUDKAN BUTON YANG LEBIH BAIK

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI MODAL UTAMA PEMBANGUNAN.

2. PENUMBUHAN INVESTASI SEBAGAI SARANA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.

3. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA.

5. PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN.

6



CALON BUPATI
ALVIN AKAWIJAYA
PUTRA, S.H.

CALON WAKIL BUPATI
SYARIFUDIN SAAFA, S.T.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS, SEJAHTERA,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN
YANG BERKELANJUTAN (BUTON BERSINAR MAS)

MISI

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), SERTA MENDORONG TERCIPTANYA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG RELIGIUS, KONDUSIF DAN BERBUDAYA.

2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN MENIAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS.

3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS POTENSI LOKAL, MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN.